

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainability Development Goals (SDGs) yang dideklarasikan pada bulan September 2015 oleh 193 kepala negara yang hadir dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York membahas pengentasan kemiskinan beserta faktor penyebabnya, peningkatan kemampuan manusia, pengurangan ketidaksetaraan, perdamaian, pengembalian degradasi planet, dan penguatan kemitraan global dalam rangka pembangunan berkelanjutan.² Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan komitmennya dalam mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development Goals*/SDGs), sebagaimana tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Prinsip pelaksanaan *Sustainability Development Goals* (SDGs) bersifat inklusif, artinya seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, sektor swasta, dan individu berperan aktif dalam prosesnya. Oleh sebab itu, keterlibatan dunia usaha menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan tujuan tersebut. Salah satu wujud nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda ini adalah melalui pengungkapan informasi terkait SDGs dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan diperjelas dengan adanya lampiran Surat Edaran OJK Nomor

² Wisnu Setyawan, Nanny Dewi Tanzil, and Dini Rosdin, "Pengaruh Karakteristik Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Dukungan SDGS Dalam Laporan Keberlanjutan," *Jurnal Akuntansi Aktual* 9, no. 1 (February 28, 2022): 15–24, <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p015>.

16/SEOJK.04/2021, yaitu memuat informasi terkait 17 SDGs yang menjadi prioritas perusahaan dalam menjalankan bisnis. Pengungkapan SDGs secara terbuka dan transparan mencerminkan tanggung jawab serta komitmen perusahaan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.³

Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam upaya mendekati target SDGs untuk tahun 2030. Berdasarkan *Sustainable Development Report* 2023, Indonesia berada di peringkat ke-75 dunia. Kenaikan ini menunjukkan hasil positif jika dibandingkan empat tahun sebelumnya yakni berada di peringkat 102. Selain itu, skor indeks SDGs Indonesia mengalami peningkatan dari 64,2 pada 2019 menjadi 70,2 pada 2023, menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-4 di kawasan ASEAN dalam hal pencapaian SDGs.⁴ Namun, pada 2024, skor indeks SDGs Indonesia mengalami penurunan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang menghambat pengurangan kemiskinan, masalah lingkungan hidup seperti deforestasi dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan. Menurut *Sustainable Development Report* 2024, skor SDGs Indonesia yang pada 2023 mencapai 70,2 turun menjadi 69,43 pada 2024, menyebabkan peringkat Indonesia turun ke posisi 78 dari 166 negara. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, tantangan dalam pencapaian SDGs masih harus diatasi agar target 2030 dapat tercapai

³ Nyoman Radhika Saraswati Devi and Ni Made Dwi Ratnadi, "Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Dan Kualitas Pengungkapan Sustainable Development Goals," *E-Jurnal Akuntansi* 34, no. 10 (October 9, 2024): 2518–2529, <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i10.p05>.

⁴ Gracia Billy Mambrasar, "Indonesia Perlahan Tapi Pasti Mencapai Target SDGs Tahun 2030," CNBC Indonesia, 2024, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/>, pada 2 Februari 2025.

secara optimal. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, berikut disajikan data skor indeks SDGs Indonesia selama tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 1.1
Skor SDGs Indonesia 2019 – 2024

Tahun	Skor SDGs Indonesia	Ranking SDGs Indonesia
2019	67,94	102 dari 166 negara
2020	68,44	101 dari 166 negara
2021	68,95	97 dari 166 negara
2022	69,24	82 dari 163 negara
2023	70,20	75 dari 166 negara
2024	69,43	78 dari 167 negara

(Sumber : *SDGs Transformation Center*)

Salah satu tantangan utama dalam pencapaian SDGs adalah dampak lingkungan yang masih sering diabaikan oleh perusahaan, khususnya di sektor barang konsumsi. Sektor konsumsi, terutama dari industri makanan, minuman, dan produk rumah tangga merupakan penyumbang limbah plastik terbesar. Berdasarkan hasil *brand audit* yang dilakukan oleh *Divers Clean Action* (DCA) dan *Break Free From Plastic* pada tahun 2018-2021, ditemukan bahwa Indofood, Unilever, dan Mayora menjadi tiga produsen terbesar penyumbang sampah plastik di berbagai wilayah Indonesia. Sampah kemasan seperti *sachet* mendominasi pencemaran dengan persentase 79,7% dan diprediksi akan terus meningkat hingga 1,3 triliun kemasan terjual pada 2027. Walaupun sudah ada regulasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/2019 yang mewajibkan produsen menyusun peta jalan pengurangan sampah

hingga 2030, masih terdapat kurangnya transparansi dari perusahaan dalam mengungkapkan rencana pengurangan sampah yang dihasilkan.⁵

Selain itu di tahun 2019, PT. Indofood Tbk. di Medan tersandung kasus pencemaran lingkungan dari sisa produksi mie instan ataupun mie instan yang sudah tidak terpakai lagi dan ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tercecer di lingkungan pabrik. Terdapat juga kasus pencemaran lingkungan oleh PT Sekar Laut Tbk. Pada tahun 2017, ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) memprotes pencemaran limbah yang dibuang ke sungai, oleh PT Sekar Laut Grup. Masyarakat juga menutup saluran dengan semen menggunakan satu unit truk molen.⁶ Berdasarkan berbagai kasus yang telah terjadi, pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan menjadi hal penting karena menunjukkan kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada penciptaan laba, tetapi perusahaan juga harus mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.⁷

Salah satu ciri perusahaan yang berkualitas adalah adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Corporate Governance*). *Corporate Governance* yang diterapkan haruslah sesuai peraturan dan kebijakan perusahaan. Tata kelola

⁵ Rachel Farahdiba Regar, "Kemasan Unilever, Indofood, dan Mayora Penyumbang Pencemaran Sampah Plastik Terbanyak," Tempo, 2022, diakses dalam, <https://www.tempo.co/>, pada 16 Februari 2025.

⁶ Kadek Ardy Sinta Dewi Martha, Skripsi : "Pengaruh Kinerja Lingkungan, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Environmental Disclosure* pada Sektor *Consumer Goods* dan Sektor Pertambangan", (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2023).

⁷ Saraswati Devi and Dwi Ratnadi, "Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Dan Kualitas Pengungkapan Sustainable Development Goals."

perusahaan (*Corporate Governance*) memegang peran penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Fungsinya mencakup pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap segala rencana dan kegiatan dalam pengembangan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan transparansi lebih besar dalam hal dampak sosial dan lingkungan, utamanya lewat laporan keberlanjutan. Hal ini penting untuk menilai bahwa keputusan bisnis yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip sosial dan kelestarian lingkungan. Adanya tata kelola yang baik membuat perusahaan lebih terbuka dan transparan dalam memberikan informasi. Sehingga investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan kepercayaannya terhadap perusahaan.⁸

Dalam implementasinya, efektivitas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dapat diukur melalui berbagai indikator. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator utama GCG yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan, yaitu dari dewan komisaris, indikator yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit. Dari dewan direksi, indikator yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, jumlah rapat dewan direksi dan kehadiran direksi dalam rapat. Dari struktur kepemilikan perusahaan, indikator yang digunakan

⁸ Erna Wijayana and Kurniawati Kurniawati, "Pengaruh Corporate Governance, Return On Asset dan Umur Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 11, no. 2 (November 18, 2018): 157–171, <https://doi.org/10.30813/jab.v11i2.1388>.

adalah kepemilikan institusional. Masing-masing indikator ini mencerminkan aspek tata kelola yang berkontribusi dalam meningkatkan keterbukaan perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan.

Indikator pertama dari *Good Corporate Governance* adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan perwakilan pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi manajemen perusahaan, termasuk dalam aspek keberlanjutan dan pengungkapan informasi lingkungan. Jumlah anggota dewan komisaris yang memadai mencerminkan kapasitas pengawasan yang lebih besar, sehingga perusahaan lebih terdorong untuk menjalankan praktik transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin luas pula ruang bagi perusahaan untuk membentuk pengawasan yang beragam dan menyeluruh terhadap isu-isu keberlanjutan. Selain itu, keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris turut memperkuat kualitas laporan berkelanjutan.⁹

Berdasarkan teori agensi, ukuran dewan yang lebih besar dapat mengurangi dominasi manajerial dewan, sehingga dewan besar sering ditemukan lebih efektif dalam mengurangi potensi konflik kepentingan. Dewan yang lebih besar mewakili kumpulan bakat dan sumber daya yang lebih besar, sehingga memiliki kapasitas sumber daya yang lebih tinggi untuk memberi

⁹ Arin Dwi Wulandari and Eny Kusumawati, "Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Sustainable Development Goals," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 2 (February 3, 2025): 2547–2562, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i2.7051>.

nasihat kepada perusahaan tentang isu-isu keberlanjutan.¹⁰ Untuk memberikan gambaran mengenai praktik di lapangan, berikut disajikan data jumlah anggota dewan komisaris pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel dalam penelitian ini, pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6	5	6
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	8	8	8
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	6	6	7
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	7	6	6
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	3	3	3

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan data dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam jumlah anggota dewan komisaris antara perusahaan dan juga dari tahun ke tahun. PT Indofood Sukses Makmur secara konsisten memiliki struktur dewan komisaris yang besar, yakni delapan orang, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengawasan perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki komisaris yang berubah-ubah, yaitu dari enam komisaris pada tahun 2022, turun menjadi lima pada tahun 2023, dan kembali menjadi enam pada tahun 2024. PT Kalbe Farma mengalami peningkatan jumlah komisaris, dari enam menjadi tujuh orang, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan pengawasan yang strategis. PT Unilever Indonesia justru

¹⁰ Made Delia et al., “Pengaruh Struktur Kepemilikan , Karakteristik Komite Audit Dan Green Innovation Terhadap ESG Disclosure Dengan Ukuran Dewan Komisaris Sebagai Pemoderasi,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 12, no. 2 (2024): 345.

mengalami penurunan ukuran dewan komisaris, dari tujuh orang menjadi enam orang. PT Nippon Indosari Corpindo konsisten mempertahankan struktur dewan komisaris yang kecil, yakni tiga orang.

Indikator kedua adalah proporsi komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan apa pun, baik keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham serta hubungan kekeluargaan dengan komisaris, direksi, pemegang saham maupun pihak lain di dalam perusahaan, sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bersikap dan bertindak secara independen.¹¹ Sebagai elemen penting dalam penerapan GCG, komisaris independen memiliki peran dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Komisaris independen juga membantu meningkatkan pengungkapan informasi kepada para *stakeholder*, termasuk memberi dorongan kepada manajemen untuk mengungkapkan laporan berkelanjutan (*sustainability report*).¹² Teori agensi menjelaskan bahwa melalui peningkatan proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengawasan yang berdampak pada peningkatan pada kualitas dan kelengkapan pengungkapan.¹³ Untuk memberikan gambaran mengenai praktik di lapangan,

¹¹ Fuad Kevin Nicholas Sirait, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021)," *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 1 (2024): 1–14, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

¹² Yudhistira Katoppo and Yuni Nustini, "Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Komisaris Independen Terhadap Corporate Sustainability Performance," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 4 (March 18, 2022): 769–91, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1085>.

¹³ Kevin Nicholas Sirait, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, And Governance (ESG) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021).".

berikut disajikan data mengenai proporsi komisaris independen pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Proporsi Komisaris Independen Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	50%	40%	50%
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	38%	38%	38%
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	33%	50%	43%
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	71%	83%	83%
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	33%	33%	33%

Sumber : Data diolah peneliti

Menurut Peraturan OJK, Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% dari total anggota Dewan Komisaris.¹⁴ Berdasarkan data dalam tabel 1.3 menunjukkan proporsi komisaris independen PT Indofood CBP Sukses Makmur sempat turun dari 50% pada tahun 2022 menjadi 40% pada tahun 2023, lalu naik kembali ke 50% pada tahun 2024. Sedangkan PT Indofood Sukses Makmur konsisten berada di angka 38% selama tiga tahun berturut-turut. PT Kalbe Farma mengalami peningkatan signifikan dari 33% pada tahun 2022 ke 50% pada tahun 2023, meskipun sedikit turun ke 43% pada tahun 2024. PT Unilever Indonesia memiliki proporsi komisaris independen tertinggi, yakni 71% pada tahun 2022, meningkat ke 83% pada tahun 2023 dan tahun 2024. PT Nippon Indosari Corpindo konsisten di angka 33% selama tiga tahun. Secara umum, perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

cenderung menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap tata kelola perusahaan yang akuntabel dan berorientasi jangka panjang, yang juga dapat membantu keberlanjutan dan transparansi.

Indikator selanjutnya adalah komite audit. Komite audit merupakan elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan, seperti persyaratan pengungkapan pelaporan keuangan. Pembentukan Komite audit berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi asimetris informasi, oportunisme manajerial, dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Komite audit dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan lingkungan dengan keberadaan komite audit di perusahaan, diharapkan perusahaan akan melakukan pengungkapan lingkungan secara lebih komprehensif. Semakin besar komite audit, akan semakin meningkatkan pengawasan dan pengendalian perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan yang diharapkan.¹⁵ Teori agensi mengidentifikasi komite audit sebagai alat pemantauan penting untuk mengurangi asimetris informasi, membatasi perilaku oportunis, dan meningkatkan pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola, kinerja perusahaan, dan nilai perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antar pihak manajemen dan *prinsipal*.¹⁶ Untuk

¹⁵ Wulandari and Kusumawati, "Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Sustainable Development Goals."

¹⁶ Delia et al., "Pengaruh Struktur Kepemilikan , Karakteristik Komite Audit Dan Green Innovation Terhadap ESG Disclosure Dengan Ukuran Dewan Komisaris Sebagai Pemoderasi."

memberikan gambaran mengenai praktik di lapangan, berikut disajikan data mengenai ukuran komite audit pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Ukuran Komite Audit Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3	3	3
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3	3	3
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	3	3	3
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	3	3	3
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	3	3	3

Sumber : Data diolah peneliti

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.¹⁷ Berdasarkan data dari tabel 1.4 seluruh perusahaan dalam tabel ini tercatat memiliki jumlah anggota komite audit yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut yaitu sebanyak tiga orang. Seluruh perusahaan dalam sampel memenuhi ketentuan minimum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait ukuran komite audit, yakni memiliki minimal 3 orang anggota. Hal ini menunjukkan komitmen awal terhadap kepatuhan terhadap peraturan tata kelola, terutama dalam hal pengawasan internal dan audit.

Indikator selanjutnya adalah ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi merupakan salah satu karakteristik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dewan direksi yang lebih besar dapat

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

meningkatkan pengawasan serta transparansi pengungkapan guna mengurangi asimetris informasi. Selain itu, jumlah anggota direksi yang lebih banyak mencerminkan keberagaman latar belakang serta pengetahuan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi perusahaan. Semakin besar jumlah direksi, semakin banyak fungsi yang dapat dijalankan, sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengawasi setiap keputusan yang dibuat agar tetap sejalan dengan kebijakan yang berlaku.¹⁸ Berdasarkan teori agensi, semakin banyaknya dewan direksi diharapkan meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen sehingga mampu mendorong pengungkapan untuk menekan adanya asimetris informasi.¹⁹ Sebagai gambaran empiris terkait hal tersebut, berikut disajikan data mengenai ukuran dewan direksi pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Ukuran Dewan Direksi Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11	11	11
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	11	11	11
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	5	6	5
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	12	11	6
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	5	5	5

Sumber : data diolah peneliti

¹⁸ Kevin Nicholas Sirait, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, And Governance (ESG) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021).”

¹⁹ *Ibid.*, 10.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.²⁰ Berdasarkan data dari tabel 1.5 PT Indofood CBP Sukses Makmur dan PT Indofood Sukses Makmur memiliki ukuran dewan direksi yang konsisten dengan jumlah yang besar yaitu 11 orang. Sedangkan PT Kalbe Farma dan PT Nippon Indosari Corpindo memiliki ukuran direksi yang lebih kecil yaitu 5 orang. PT Kalbe Farma sempat memiliki jumlah direktur 6 orang pada tahun 2023 tetapi kembali menjadi 5 orang pada tahun 2024. PT Unilever Indonesia mengalami penurunan dari 12 direktur pada tahun 2022 menjadi 11 orang pada tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi hanya 6 orang. Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai ukuran dewan direksi dari lima perusahaan di sektor konsumsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir, sebagian besar perusahaan memiliki jumlah direksi yang relatif stabil.

Indikator selanjutnya adalah jumlah rapat dewan direksi. Rapat dewan direksi merupakan media penting bagi para direktur untuk mendiskusikan dan menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Frekuensi rapat direksi, umumnya diukur berdasarkan jumlah yang diselenggarakan dalam satu tahun, mencerminkan intensitas pengawasan dan efektivitas proses pengambilan keputusan. Rapat yang rutin memungkinkan

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

dewan untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi perusahaan serta memberikan ruang untuk melakukan evaluasi dan tindakan korektif terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, rapat direksi juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan, termasuk laporan berkelanjutan.²¹ Berdasarkan pada teori agensi, dewan direksi yang rutin mengadakan rapat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, semakin banyak kontrol yang diperoleh, dan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi.²² Sebagai gambaran empiris terkait hal tersebut, berikut disajikan data mengenai jumlah rapat dewan direksi pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Rapat Dewan Direksi Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	12	12	12
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	12	12	12
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	21	26	26
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	18	17	13
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	12	12	12

Sumber : data diolah peneliti

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direksi perusahaan publik wajib mengadakan rapat secara berkala, paling sedikit 1 kali

²¹ Sharifah Buniamin et al., "The Role of Corporate Governance in Achieving SDGs among Malaysian Companies," *European Journal of Sustainable Development* 11, no. 3 (October 1, 2022): 326, <https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n3p326>.

²² Angelina Putri Faradea and Suwarno, "Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi, Karakteristik Komite Audit, Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Perusahaan," *Journal of Culture Accounting and Auditing* 1, no. 2 (2022): 4, <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4341>

setiap bulan.²³ Artinya, dalam satu tahun, minimal diadakan 12 kali rapat direksi. Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur dan PT Nippon Indosari Corpindo memiliki konsistensi dalam jumlah rapat, yaitu 12 kali dalam setahun, sesuai dengan ketentuan minimal OJK. Sedangkan PT Kalbe Farma memiliki jumlah rapat direksi yang jauh melebihi ketentuan, yakni 21 kali rapat pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 26 kali rapat pada tahun 2023 dan tahun 2024. PT Unilever Indonesia juga cukup aktif, dengan 18 kali rapat pada tahun 2022, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 17 kali rapat. Lalu kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan namun tetap di atas ambang batas minimum pada tahun 2024 menjadi 13 kali rapat. Secara umum, seluruh perusahaan dalam sampel telah memenuhi kewajiban minimal jumlah rapat direksi setiap tahun.

Indikator selanjutnya adalah kehadiran dewan direksi dalam rapat. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang ideal, kehadiran dan keterlibatan direksi dalam rapat bukanlah sekadar memenuhi kewajiban administratif semata. Lebih dari itu, hal ini merupakan wujud akuntabilitas kolektif yang inheren dengan posisi dan tanggung jawab seorang direktur. Pembahasan keputusan strategis, baik menyangkut keberlanjutan (*sustainability*), risiko operasional, maupun masa depan perusahaan, membutuhkan keterlibatan aktif seluruh direksi dalam rapat. Tingkat kehadiran rapat antara anggota direksi

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

merefleksikan keefektifan dalam komunikasi dan koordinasi antara anggota direksi untuk mewujudkan GCG.²⁴ Dari perspektif teori *agency*, kehadiran yang tinggi menunjukkan komitmen direksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.²⁵ Sebagai gambaran empiris terkait hal tersebut, berikut disajikan data mengenai kehadiran direksi dalam rapat pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
Kehadiran Direksi dalam Rapat Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	100%	100%	100%
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	100%	100%	100%
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	90%	92%	100%
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	98%	95%	90%
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	100%	100%	100%

Sumber : data diolah peneliti

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017, setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima

²⁴ Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, and Ahmad Waluya Jati, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Di Indonesia," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2017): 714, <https://doi.org/10.22219/jrak.v5i1.4992>

²⁵ Lintang D. Sekarlangit and Ratna Wardhani, "The Effect of the Characteristics and Activities of the Board of Directors on Sustainable Development Goal (SDG) Disclosures: Empirical Evidence from Southeast Asia," *Sustainability* 13, no. 14 (July 17, 2021): 8007, <https://doi.org/10.3390/su13148007>

persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.²⁶ Berdasarkan tabel 1.7 PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Nippon Indosari Corpindo menunjukkan tingkat kehadiran 100% selama tiga tahun berturut-turut. PT Kalbe Farma menunjukkan peningkatan, dari 90% pada tahun 2022, naik menjadi 92% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 mampu mencapai 100%. Sedangkan PT Unilever Indonesia mengalami sedikit penurunan, yang pada tahun 2022 menunjukkan 98% kehadiran tetapi pada tahun 2023 turun menjadi 95%, dan kembali turun menjadi 90% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sektor ini telah menjalankan fungsinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam forum manajerial formal.

Indikator terakhir adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Kepemilikan Institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela, Investor institusional memiliki otoritas dan keahlian untuk bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga para pemegang saham menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.²⁷ Berdasarkan teori agensi keberadaan

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

²⁷ Vidya Utami Eryadi, Ilham Wahyudi, and Salman Jumaili, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah, Dan Profitabilitas Terhadap

kepemilikan institusional diharapkan mendorong *monitoring* terhadap keputusan manajemen, mengingat jumlahnya yang besar dan sering kali mendominasi sehingga pihak institusi memiliki pengaruh signifikan guna mendorong kebijakan salah satunya pengungkapan keberlanjutan. Hal ini tidak terlepas demi memitigasi adanya asimetris informasi antara agen dan *principal*.²⁸ Untuk menggambarkan tingkat kepemilikan institusional tersebut, berikut disajikan data mengenai kepemilikan institusional pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.8.

Tabel 1.8
Kepemilikan Institusional Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	81%	81%	81%
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	50%	50%	50%
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	58%	58%	58%
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	85%	85%	85%
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	83%	83%	77%

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 1.8 menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur mempertahankan angka kepemilikan institusional yang tinggi dan konsisten, yaitu 81% setiap tahun. Sedangkan PT Indofood Sukses Makmur memiliki tingkat kepemilikan institusional yang paling rendah tetapi tetap stabil diangka 50% selama tiga tahun terakhir. PT Kalbe Farma juga konsisten di

Sustainability Reporting Assurance,” *Conference on Economic and Business Innovation* 1, no. 1 (2021): 1–17.

²⁸ Kevin Nicholas Sirait, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, And Governance (ESG) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021).”

angka 58% selama tiga tahun terakhir. PT Unilever memiliki persentase kepemilikan yang sangat tinggi dan konsisten, yaitu 85%. PT Nippon Indosari Corpindo juga memiliki persentase yang tinggi pada tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu 83%, tetapi menurun menjadi 77% pada tahun 2024. Secara umum, kelima perusahaan dalam tabel ini memiliki tingkat kepemilikan institusional yang cukup tinggi, dengan mayoritas perusahaan berada di atas 50%. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak investor institusional yang terlibat, pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif.

Selain GCG, pengungkapan SDGs diduga juga dipengaruhi oleh tarif pajak efektif. Pajak adalah salah satu instrumen penting yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan kewajiban fiskalnya secara adil dan bertanggung jawab. Tarif ini dihitung dengan membagi total beban pajak oleh pendapatan sebelum pajak, sehingga dapat berfungsi sebagai barometer efisiensi pajak perusahaan lintas yurisdiksi fiskal. Perusahaan yang terlibat dalam praktik berkelanjutan dapat memperoleh manfaat dari berbagai insentif, kredit, dan pengurangan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan operasi bisnis yang ramah lingkungan. Manajemen yang berorientasi pada keberlanjutan dapat mengembangkan strategi perpajakan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan penyelarasan antara upaya keberlanjutan

dengan tanggung jawab fiskal, menciptakan kerangka strategi pajak yang sekaligus mendukung kinerja keuangan dan pencapaian tujuan berkelanjutan.

Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen (sebagai agen) bertindak atas nama pemilik (*prinsipal*), tetapi tidak jarang terjadi konflik kepentingan antara keduanya. Dalam konteks ini, pelaporan keberlanjutan memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan cenderung memiliki ETR yang lebih tinggi karena mengurangi praktik penghindaran pajak dan agresivitas pajak.²⁹ Untuk menggambarkan tingkat tarif pajak efektif, berikut disajikan data mengenai tarif pajak dari lima perusahaan sektor konsumsi terbesar yang menjadi sampel penelitian ini pada tabel 1.9.

Tabel 1.9
Tarif Pajak Efektif Perusahaan Konsumsi di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24%	26%	23%
2.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	25%	26%	23%
3.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	32%	31%	30%
4.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	24%	23%	23%
5.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	25%	22%	23%

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma memiliki tarif pajak efektif tertinggi, yakni 32% pada tahun 2022, sedikit menurun menjadi 31% pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 30% pada tahun

²⁹ Valentine Siagian et al., "The Influence of Corporate Sustainability on Tax," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 11, no. 2 (2024): 320.

2024. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk lebih relatif stabil, yakni 24% pada tahun 2022 dan tahun 2023, lalu sedikit menurun menjadi 23% pada tahun 2024. PT Unilever Indonesia juga memiliki tarif pajak yang cukup konsisten, yaitu 24% pada tahun 2022, lalu turun sedikit menjadi 23% pada tahun 2023 dan tahun 2024. PT Indofood Sukses Makmur memiliki tarif pajak 25% pada tahun 2022, naik sedikit menjadi 26% tahun pada 2023, dan kemudian turun ke 23% pada tahun 2024. PT Nippon Indosari Corpindo memiliki persentase sebesar 25% pada tahun 2022, lalu turun menjadi 22% pada tahun 2023, dan naik kembali menjadi 23% pada tahun 2024. Secara umum, tarif pajak efektif pada lima perusahaan sektor konsumsi terbesar di Indonesia menunjukkan fluktuasi ringan selama tahun 2022–2024. Secara keseluruhan, tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan sektor konsumsi cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi selama 2022–2024. PT Kalbe Farma Tbk tercatat memiliki tarif tertinggi, sementara perusahaan lain menunjukkan pola yang relatif konsisten dari tahun ke tahun.

Penelitian ini menggunakan indikator GCG yang berbeda dan relatif masih jarang digunakan secara bersamaan dalam penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini akan lebih fokus pada perusahaan sektor barang konsumsi. Pemilihan sektor ini didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap permasalahan lingkungan, khususnya limbah plastik. Sektor barang konsumsi juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan rentang tahun 2022 sampai tahun 2024, karena rata-rata perusahaan di sektor konsumsi ini

baru menerbitkan laporan berkelanjutan pada tahun 2021, dan mengungkapkan informasi mengenai *Sustainable Development Goals* pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut *Good Corporate Governance* (GCG) dan tarif pajak efektif dalam hubungannya dengan pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada laporan keberlanjutan. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan judul penelitian **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Tarif Pajak Efektif Terhadap Pengungkapan SDGs dalam Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul di dalam penelitian ini. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam upaya mendekati target SDGs untuk tahun 2030. Namun dalam sisa waktu enam tahun untuk dapat mencapai 17 tujuan SDGs secara penuh masih merupakan tantangan besar. Dari 2019 hingga 2023 Indonesia telah menunjukkan kenaikan peringkat dan skor indeks SDGs secara signifikan. Namun pada 2024 terjadi penurunan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi serta masalah lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Sektor barang konsumsi, terutama industri makanan, minuman, dan produk rumah tangga, merupakan penyumbang limbah plastik terbesar dengan Indofood,

Unilever, dan Mayora sebagai produsen utama. Selain itu, juga terjadi kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan seperti PT Indofood Tbk dan PT Sekar Laut Tbk, hal ini menunjukkan pentingnya pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan perusahaan lebih transparansi.

Penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan untuk menciptakan pengungkapan informasi yang luas dan terintegrasi. Pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan menjadi hal penting karena menunjukkan kontribusi perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan. Pada saat ini, semakin banyak perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, tetapi untuk kualitas dan kelengkapannya yang sesuai dengan pedoman GRI masih beragam. Implementasi GCG diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun, selain penerapan GCG, aspek fiskal seperti tarif pajak efektif juga menjadi perhatian penting dalam konteks keberlanjutan. Tarif pajak efektif mencerminkan sejauh mana perusahaan berkontribusi secara fiskal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, namun pada kenyataannya, masih ditemukan variasi antar perusahaan yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam integrasi strategi fiskal dengan komitmen keberlanjutan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, jumlah rapat dewan direksi, kehadiran direksi dalam rapat, kepemilikan institusional, dan tarif pajak efektif berpengaruh

terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
6. Apakah jumlah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
7. Apakah kehadiran direksi dalam rapat berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

8. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
9. Apakah tarif pajak efektif berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, jumlah rapat dewan direksi, kehadiran direksi dalam rapat, kepemilikan institusional, dan tarif pajak efektif terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
6. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
7. Untuk menganalisis pengaruh kehadiran direksi dalam rapat terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
8. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
9. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak efektif terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai hubungan antara mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), tarif pajak efektif dan pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang berkualitas serta strategi pajak yang bertanggung jawab,

dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Fakultas

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator *Good Corporate Governance* yang merupakan bagian dari materi dalam mata kuliah akuntansi. Indikator komite audit diajarkan dalam mata kuliah *Auditing*, dan struktur kepemilikan, seperti kepemilikan institusional, termasuk dalam materi Akuntansi Keuangan Lanjutan. Selain itu, tarif pajak efektif yang dianalisis dalam penelitian ini juga berkaitan dengan materi dalam mata kuliah Perpajakan, khususnya dalam memahami praktik perhitungan dan analisis tarif pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tentang penerapan GCG dan tarif pajak efektif, yang tidak hanya sebagai konsep teoritis, namun juga nyata dalam praktik perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan tarif pajak efektif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan terkait tata kelola perusahaan, tarif pajak efektif, dan pengungkapan *Sustainable Development*

Goals(SDGs) sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan untuk mengembangkan teori dan model yang akan digunakan ke depannya. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Objek penelitian hanya mencakup perusahaan sektor barang konsumsi, sehingga hasilnya belum mewakili seluruh sektor industri. Indikator GCG yang digunakan juga masih terbatas pada enam indikator, dan belum mencakup indikator lain seperti keberagaman gender dalam dewan komisaris, keberadaan komite keberlanjutan, CSR Officer, maupun direktur asing. Selain itu, masih terdapat variabel lain yang berpotensi memengaruhi pengungkapan SDGs, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan Corporate Social Responsibility (CSR), namun belum dianalisis dalam penelitian ini.

Tarif Efektif Pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen. Namun, karena sifatnya lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan fiskal, disarankan agar penelitian selanjutnya menempatkan variabel ini sebagai moderator. Sebagai variabel moderating, Tarif Efektif Pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh GCG terhadap pengungkapan SDGs, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kepatuhan pajak dalam memperkuat transparansi keberlanjutan perusahaan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah *Good Corporate Governance* dan tarif efektif pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengungkapan SDGs.
- b. Subyek penelitian ini menggunakan perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024.
- c. Data diperoleh dari web resmi Bursa Efek Indonesia.

2. Batasan Penelitian

- a. Penelitian dilakukan di perusahaan sektor konsumsi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Data penelitian menggunakan laporan keberlanjutan, laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor konsumsi tahun 2022 sampai 2024.
- c. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) meliputi *Good Corporate Governance* (X_1) dan Tarif Pajak Efektif (X_2), dengan variabel terikat (Y) Pengungkapan SDGs.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan dasar mengenai suatu variabel, berdasarkan teori atau literatur yang ada. Berikut penegasan istilah dalam penelitian ini:

a. *Good Corporate Governance*

GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi atau seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab perusahaan.³⁰

b. Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif adalah rasio antara beban pajak yang benar-benar dibayar oleh wajib pajak dengan laba sebelum pajak, yang berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan perpajakan terhadap beban pajak penghasilan perusahaan dan memungkinkan analisis yang lebih akurat atas implikasi finansial dari perubahan tarif pajak atau kebijakan perpajakan lainnya.³¹

c. Pengungkapan *Sustainable Development Goals*

Pengungkapan SDGs adalah proses pelaporan pencapaian tujuan SDGs dari suatu perusahaan yang tertuang dalam laporan keberlanjutan. *Sustainable Development Goals*(SDGs) sendiri adalah, sebuah agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target, yang saling terikat, mempengaruhi, inklusif, dan

³⁰ Sudarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

³¹ Riska Fatikasari, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty, "Pengaruh Tarif Pajak Efektif , Mekanisme Bonus , Kontrak Utang , Dan Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer," *Jurnal Projemen UNIPA* 3, no. 3 (2025): 114.

terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orang pun yang terlewatkan (*no one left behind*), dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030.³²

d. Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan didefinisikan sebagai proses yang membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan menuju ekonomi global yang berkelanjutan yang menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab sosial dan perawatan lingkungan.³³

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan tentang variabel secara nyata, dengan tujuan untuk membantu suatu variabel mudah dipahami. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

a. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur jalannya perusahaan agar dikelola secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya.

³² Yuni Guntari dkk., “Sustainable Development Goals (SDGs) Implementasi SDGs Pendidikan Desa Berkualitas di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis,” *Unigal Repository*, 2023.

³³ Luk Luk Fuadah, Yuliani, and Riska Henda Safitri, *Pengungkapan Sustainability Reporting Di Indonesia*, (Palembang: Citrabooks Indonesia, 2018).

b. Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif adalah rasio yang menunjukkan berapa pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan atau realitas beban pajak perusahaan. Tarif pajak efektif bermanfaat untuk menilai seberapa besar pengaruh kebijakan pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

c. Pengungkapan *Sustainable Development Goals*

Pengungkapan SDGs adalah proses pengungkapan informasi atau pelaporan kontribusi perusahaan dalam pencapaian SDGs. Pengungkapan ini biasanya dimuat dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan, sehingga pemangku kepentingan, seperti investor dan masyarakat, dapat melihat sejauh mana peran perusahaan dalam membantu Indonesia mencapai target SDGs 2030.

d. Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang dikeluarkan setiap tahun oleh perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Laporan keberlanjutan berisi penjelasan tentang kebijakan, strategi, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi harus memperhatikan sistematika penulisan yang sesuai, yakni terdiri dari bagian awal, utama, akhir.

Pada bagian awal sistematika penulisan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

Pada bagian utama mencakup 6 bab beserta beberapa sub bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mencakup teori yang menganalisis variabel atau sub variabel pertama serta teori selanjutnya, analisis penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang pendekatan serta jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel juga skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Memuat tentang deskripsi hasil pengolahan data serta uji hipotesis juga temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Memuat tentang pembahasan serta hasil analisis dari pengolahan data.

BAB VI : PENUTUP

Berkaitan tentang kesimpulan serta saran yang bisa dipergunakan pihak yang memerlukan.

Pada bagian akhir mencakup daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi serta daftar riwayat hidup.